

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Didik M. Arif Mansul & Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologo Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Juli Irmayanto dkk, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kabrina Rian Ferdiani, 2020, *Waspada Pinjaman Online*, Jakarta.
- Kasmir, 2011, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komarudian, 1994, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta.
- M.Manullang, 1995, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nofie Imam, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Raka Fauzan Hatamia dkk, 2015, *Penegakkan Hukum*, Bandung: Ghalia Ilmu, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto, 2016, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Ghalia Ilmu.

Sugiyono, 2016, *Metodologi Kualitatif*, Bandung: Rosdha Karya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka: Jakarta, cet III.

Peraturan Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang – Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang – Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jurnal

Afika Yumya Syahmi, 2004, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang – undang Otoritas Jasa Keuangan, *Skripsi*.

Bisdan Sigalingling, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia, *Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan*.

Rebekka Dosma Sinaga, 2013, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank setelah Lahirnya Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*.

Subhan Zein, 2019, Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer to Perer Landing/Crowponding, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurnya*. Vol.4, No.2, Juni 2019.

Zulkarnain Sitompul, “Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan,” (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), hlm. 16.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Striawan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2012.